1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Flores Timur tidak termasuk dalam kota yang menjadi basis perhitungan inflasi. untuk Kabupaten Flores Timur mengginakan pendekatan perhitungan Kota Maumere Kabupaten Sikka. Perkembangan harga barang kebutuhan masyarakat dapat terlihat pada Indeks Perkembangan Harga (IPH} sebagai berikut :

INDEKS PERKEMBANGAN HARGA KAB. FLOTIM 2026 BULAN APRIL - JUNI

Minggu Ke	AngkaIPH (%)	Komoditi Andil Perubahan Harga
M1 APRIL	0,40	Cabai Merah Cabai Rawit Daging Ayam Ras
M2 APRIL	0,86	Cabai Merah Cabai Rawit Daging Ayam Ras
M3 APRIL	1,27	Beras Cabai Merah Bawang Merah
M4 APRIL	1,41	Beras Bawang Merah Cabai Merah
M5 APRIL	1,43	Beras Bawang Merah Cabai Merah
M1 MEI	-0,33	Telur Ayam Ras Cabai Merah Bawang Putih

M2 MEI	-0,46	Telur Ayam Ras Bawang Putih Cabai Rawit
M3 MEI	-0,86	Telur Ayam Ras Cabai Rawit Cabai Merah
M1 jUNI	0,24	Tahu Mentah Cabai Merah Minyak Goreng
M2 JUNI	0,81	Tahu Mentah Cabai Merah Minyak Goreng
M3 JUNI	0,99	Tahu Mentah Cabai Merah Minyak Goreng
M4 JUNI	0,01	Tahu Mentah Cabai Merah Minyak Goreng

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Masih tingginya tingkat ketergantungan pasokan kebutuhan masyarakat dari luar wilayah Kabupaten Flores Timur
2. Panjangnya rantai distribusi dan kesenjangan informasi antar pelaku usaha menyebabkan harga barang menjadi tidak efisiensi. sebagai contoh harga minyak goreng khusus minyakita yang dijual pedagang dengan harga di atas harga HET yang ditetapkan pemerintah yakni 15.700/liter. Hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang sistem penyaluran minyakkita sehingga pedagang menjual dengan harga sesuai harga perolehan ditambah biaya transport dan biaya lainnya yang muncul pada proses jual beli minyakkita di pasaran.
3. Produktiitas pangan yang kurang baik sebagai akibat kondisi iklim dan cuaca yang cenderung berubah-ubah disebagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur yang berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan produktitas pangan.
4. Menurunnya daya beli masyarakat yang menjadi salah satu penyebab lesunya

perekonomian masyarakat

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Melakukan pemantauan harga komoditas barang kebutuhan pokok masyarakat setiap hari yang berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan perindustrian
    2. Melakukan koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat di tingkat distributor
    3. Melakukan pelatihan kepada masyarakat khususnya kelompok tani tentang perkembangan teknologi pertanian, pertanian organik dan kegiatan usaha tani lainnya yang berkoordinasi dengan penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
    4. Pengembangan unit pengelolaan pupuk dan pestisida organik
    5. Peningkatan diversifikasi pangan
    6. Meningkatkan produktivitas UMKM melalui digitalisasi
    7. Pengembangan unit pengelolaan pupuk dan pestisida organik
    8. Himbuan Gerakan Menanam tanaman cepat panen seperti cabai, tomat, terung dengan memanfaatkan pekarangan rumah
    9. Terus mengkampanyekan Gerakan NONA SARI SETIA atau Gerakan No Nasi Satu Hari Sehat dan Bahagia dimana gerakan ini mengajak masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan untuk konsumsi sehari-hari dengan memanfaatkan hasil kebun seperti ubi dan pisang sebagai pengganti beras.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    TPID Kabupaten Flores Timur melakukan evaluasi rutin setiap minggu bersamaan dengan pelaksanaan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara virtual. evaluasi dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang termuat dalam Roadmap dan perubahan harga barang sebagai dasar perhitungan angka IPH setiap minggu yang dilaporkan BPS serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    Tim Pegendalian Inflasi Daerah (TPID Kabupaten Flores Timur terus berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Instansi/OPD terkait, Stakeholders maupun lembaga dan instansi vertikal lainnya